

Implementasi Social Services oleh Pendidikan Tinggi Islam: Studi Kasus IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Islamic Higher Education Social Services: A Case Study IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fuad Rahman, Sururuddin & Hermanto Harun

Dosen IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM 16, Muaro Jambi, Jambi

Email: budakmudik@yahoo.com

Abstrak: Masalah utama penelitian dalam artikel ini adalah signifikansi pendidikan tinggi dalam melakukan kegiatan pelayanan sosial. Lokus penelitian ini adalah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian menemukan bahwa kendala ketika melakukan kegiatan pelayanan sosial adalah konseptual dan metodologi ketika melaksanakan program pengabdian masyarakat di lapangan. Secara konseptual, pelayanan sosial program hanya diterjemahkan ke dalam mahasiswa kerja lapangan sosial, sedangkan metodologi kerja lapangan tidak membawa kreativitas baru atau inovasi. Masyarakat menuntut perguruan tinggi Islam untuk memberikan pelayanan sosial dengan tindakan lebih nyata seperti bimbingan bagi guru agama, bimbingan dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat dan manajemen masjid, serta bantuan teknis dalam melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Pelayanan sosial.

Abstract: The main issue to be explored in this article is how insignificant a higher education in performing social services activities. The locus of this study is IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Barriers that occur when conducting social services activities including conceptual and methodological obstacles when implementing community service programs in the field. Conceptually, social services programs simply translated into college students social field work, while the methodology of field work does not bring any new creativity or innovation. Communities demand that the Islamic university to give social services with concrete actions such as guidance for religious teachers, guidance in the management and implementation of zakat and management of mosque, as well as technical assistance in carrying out socio-economic activities.

Keywords: Social Services, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Community Services.

A. Pendahuluan

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 37 Tahun 2008, mengemban tugas “melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian”. Menurut Keputusan Menteri Agama ini, semestinya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pendidikan tinggi, termasuk civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berlandaskan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang berkait erat dengan pendidikan yang dikembangkan di lembaga ini, yang sebelumnya juga dilakukan penelitian.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika semestinya juga tidak harus bersifat percuma, namun dapat dikelola berdasarkan manajemen yang jelas. Kejelasan manajemen umpamanya dengan menunjuk seorang atau beberapa orang tenaga ahli, waktu, perencanaan materi yang jelas, dana yang cukup, organisasi, dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga memerlukan model tertentu yang sesuai dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui model yang cocok dan diperlukan dalam pengabdian kepada masyarakat, maka penelitian yang melatari artikel ini telah dilakukan secara ilmiah oleh beberapa orang dalam civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan guna menggali kebutuhan masyarakat Jambi terhadap perguruan tinggi Islam ini.

B. Konsep Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.¹ Namun demikian dalam pelaksanaannya konsep atau model yang tepat untuk dituangkan dalam program pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemetaan atau pengelompokan masyarakat baik berdasarkan sudut pandang ekonomi, budaya dan berbagai sistem sosial lainnya.

Secara sosiologis, kehidupan masyarakat ada yang bersifat stabil dan ada yang mengalami ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Dikotomi lain dalam sosiologi juga menyatakan ada modern dan ada tradisional. Namun, ada juga komunitas yang dipanggil komunitas marginal yaitu yang terdiri dari komunitas pedalaman, kaum miskin kota dan masyarakat marginal pesisir. Penelitian ini juga bermaksud memahami konteks masyarakat sehingga diketahui tingkat kebutuhan masyarakat terhadap program pengabdian kepada masyarakat dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka baik sebagai masyarakat kota maupun masyarakat desa dengan segala bentuk hubungan sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto² masyarakat mempunyai dua macam hubungan dalam interaksi sosialnya yaitu hubungan simetris dan hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah hubungan yang dilandasi daya tarik suatu kelompok terhadap kualitas kelompok lain. Hubungan asimetris menyebabkan terjadinya berbagai dorongan, yaitu: (1) Dorongan untuk senantiasa bersama dengan pihak lain yang mempunyai daya tarik (popularitas) walaupun tidak harus menganutnya; (2) Dorongan untuk meniru tingkah laku pihak yang mempunyai daya tarik dan menganggapnya sebagai contoh; (3) Dorongan untuk mengikuti keteladanan atau perintah pihak yang mempunyai daya tarik.

Untuk itu program pengabdian kepada masyarakat terus diusahakan sejalan dengan persepsi, pandangan, dan keinginan masyarakat yang bercirikan seperti uraian di atas. Dalam hal program pengabdian yang dirancang tanpa memperhatikan corak atau bentuk masyarakat seperti telah digambar di atas, maka akan mendapatkan resistensi sosiologis

berupa penolakan masyarakat atas keinginan pihak pelaku program dan kehadirannya ditegaskan sebagai *outsider* oleh suatu komunitas. Terjadinya resistensi terhadap ide-ide perubahan (*resistance of change*) menurut Soerjono Soekanto³ antara lain disebabkan kurangnya intensitas hubungan satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain. Kehidupan yang mengasingkan diri dari masyarakat lain menyebabkan bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain itu yang mungkin akan dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal itu pula yang menyebabkan resistensi masyarakat terhadap program pengabdian masyarakat oleh pendidikan tinggi, baik umum atau pendidikan tinggi Islam.

C. Model Pengabdian Kepada Masyarakat di Pendidikan Tinggi

Secara umum model pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan selama ini oleh pendidikan tinggi, meliputi :

- a) Membuat pola pengabdian yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelatihan, kursus dan keterampilan-keterampilan yang secara ekonomi dapat menunjang dan menambah penghasilan keluarga.
- b) Membuat pola pengabdian yang berbentuk aksi sosial pendidikan dan keagamaan, berupa kegiatan bebas aksara, pengajian-pengajian dengan materi yang terprogram dan terjadwal secara priodik.
- c) Melakukan komunikasi dengan berbagai dinas/instansi yang dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melalui penyuluhan dan latihan bagi kemajuan hidup masyarakat.
- d) Memprogramkan kegiatan bersih lingkungan, kegiatan olahraga, penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya sejalan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.

Keberadaan IAIN sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Islam juga telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sebagaimana kegiatan-kegiatan di atas, sehingga lembaga ini juga sebenarnya telah berperan aktif bagi pengembangan struktur sosial ekonomi, pendidikan, budaya, agama dan sebagainya, yang secara tidak langsung turut mencoba menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan lokal maupun dalam menjawab tantangan global. Dalam merealisasikan program-program di atas, secara konsepsional pendidikan tinggi dimanapun sebenarnya memerlukan beberapa hal, seperti metode penentuan prioritas program dan memahami kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan hidup masyarakat yang dimaksudkan adalah komponen-komponen yang menjadi penunjang ketahanan hidup masyarakat secara jangka panjang. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, budaya, dan kegiatan sosial yang ada kaitannya dengan ketahanan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dalam hal ini perguruan tinggi mengambil peran sebagai *trigger* atau pemantik pembangunan masyarakat.

Dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat ada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi antara lain:

- a) Panduan Aplikasi : Program Tahun 2007 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah. Panduan bersikan sasaran program (penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah), termasuk jadwal pelaksanaan program.
- b) Pedoman Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Diorektorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2008 yang berisikan : analisis kebutuhan program pengabdian kepada masyarakat, problema masyarakat pedalaman, miskin kota dan daerah pesisir, transformasi pendidikan tinggi Islam dalam pemberdayaan masyarakat, program pengabdian kepada masyarakat, rancangan program penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dan model laporan pengabdian kepada masyarakat.

Berbagai literatur yang ditulis oleh para ahli Sosiologi dan ilmu kemasyarakatan juga menjadi panduan. Tetapi literatur tersebut belum membicarakan hal-hal yang menyangkut model atau bentuk pengabdian kepada masyarakat yang implementatif, terencana dan terukur seperti yang akan diuraikan di bagian akhir artikel ini. Berbagai literatur dan pedoman yang ada hanya dijadikan acuan dalam mempelajari dan memahami seluk beluk kehidupan masyarakat, terutama yang dikaitkan dengan perubahan dan pengembangan masyarakat di era transformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

D. Profil IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lahir dari kesadaran umat Islam Jambi tentang pentingnya sebuah institusi pendidikan Islam, sebagai wahana dalam pengembangan sekaligus benteng identitas keIslaman masyarakat Jambi. Disisi lain, wujudnya IAIN Sulthan Thaha Saiuddin didorong oleh hasrat masyarakat dan ulama pada masa itu, setelah memperhatikan banyaknya institusi pendidikan di tingkat menengah atas yang mengeluarkan alumni, sementara belum ada pendidikan tinggi yang dapat menampung tamatan tersebut. Atas dasar itu, maka pada tahun 1957 diadakanlah Kongres Ulama Jambi yang berhasil melahirkan suatu keputusan bahwa di Jambi sudah saatnya didirikan perguruan tinggi. Pada tanggal 29 September 1960 didirikanlah Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam al-Hikmah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Jambi.

Kurun tiga tahun pertama, Fakultas Syari'ah telah menunjukkan hasil signifikan karena adanya koordinasi antara pimpinan, pemerintah daerah dan pusat, serta dukungan moril masyarakat. Dengan SK Menteri Agama Nomor: 50 tahun 1963 tanggal 12 Mei 1963 dinegerikanlah Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian berubah menjadi cabang IAIN Raden Fatah Palembang. Penegerian ini memberi semangat baru kepada penguasa, ulama, serta pemuka masyarakat, terutama Gubernur Provinsi Jambi saat itu (M.J. Singadekane) untuk memperjuangkan berdirinya IAIN dengan menaungi beberapa fakultas.

Di samping itu, sejak tanggal 11 Juli 1965 Yayasan Perguruan Tinggi Ma'arif yang telah eksis di Kota Jambi telah memiliki Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin dan di Sungai Penuh – Kerinci. Di sana juga telah berdiri Fakultas Syari'ah Muhammadiyah pada bulan Maret 1964. Dari semua prestasi kerja di atas, dan untuk memenuhi impian para pejabat, masyarakat,

dan para ulama sekaligus Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jambi tersebut, akhirnya Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin yang ada di Yayasan Perguruan Tinggi Al Ma'arif dan Fakultas Syari'ah Muhammadiyah di Kerinci diusulkan untuk dimergerkan dalam suatu wadah menjadi fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Jambi. Usulan itu dilakukan kerana berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor: 11 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1963, bahwa untuk syarat didirikannya suatu IAIN minimal harus memiliki tiga fakultas.

Pada tanggal 30 September 1965 dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 18 tahun 1965 terbentuklah Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jambi yang disetujui oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor: 83 tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965. Setelah melalui proses, perjalanan dan perjuangan panjang yang dilakukan Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jambi tersebut, maka Menteri Agama RI akhirnya menyetujui berdirinya IAIN di Provinsi Jambi dengan Surat Keputusan Nomor: 84 tahun 1967 tanggal 27 Juli 1967. Berbekal Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, pada tanggal 8 September 1967 sekaligus bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1387 Hijriah diresmikanlah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin oleh Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dengan komposisi personalia sebagai berikut : H. A. Manaf, (Gubernur Jambi), H.M.O. Bafadhal, Dekan Fakultas Syari'ah, Drs.H.Z. Azuan (Dekan Fakultas Tarbiyah), K.H.A. Qadir Ibrahim (Dekan Fakultas Usuludin), A.R. Dayah (dekan Fakultas Syariah Kerinci).

Setelah berjalan beberapa tahun, dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama RI Nomor: 69 tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin ditingkatkan status-nya dari fakultas muda menjadi fakultas madya. Perubahan status tersebut, maka secara hukum dan kelembagaan semua fakultas telah diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral.

Ketika tenaga dosen telah banyak yang memenuhi kualifikasi pendidikan Strata 2 dan Strata 3, maka tahun 1995, ide membuka Program Pascasarjana pun mengemuka. Menindaklanjuti ide tersebut, pada bulan Februari 1999 Panitia Persiapan Pendirian Program Pascasarjana yang langsung diketuai oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah dan anggota yang lain secara serius dan bekerja keras mempersiapkan program persiapan pendirian Program Pascasarjana dan diajukan ke Departemen Agama di Jakarta pada tanggal 14 April 1999. Oleh Departemen Agama, pengajuan itu ditindaklanjuti dengan visitasi (kunjungan lapangan) ke Jambi melalui sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Mastuhu, M.Ed, guna melihat kesiapan pendirian Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Setelah itu, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi membuka Program Pascasarjana. Visitasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu tanggal 14 hingga 15 Juli 1999 dan 30 hingga 31 Juli 1999. Hasilnya, oleh tim visitasi merekomendasikan bahwa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi layak membuka dan melaksanakan Program Pascasarjana, yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/283/1999 tanggal 2 September 1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

IMPLEMENTASI SOCIAL SERVICES OLEH PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Proses pembelajarannya di Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada awalnya hanya membuka satu konsentrasi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Setelah setahun kemudian ditambah lagi dengan satu konsentrasi, yakni Metodologi dan Pemikiran Hukum Islam (MPHI), hingga tahun 2007 Program Pascasarjana telah memiliki empat konsentrasi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Metodologi dan Pemikiran Hukum Islam (MPHI), Pemikiran dan Akidah Filsafat Islam (PAFI), Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam (PEBI).

Sepanjang sejarah berdirinya, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dipimpin oleh tokoh-tokoh yang terkemuka di bidangnya, yaitu: H. Manaf, Drs. HA Munir SA, Drs. Ruslan Abd Ghani, Prof. Syeikh H.M.O Bafadhal, Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwein, MA, Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah, Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA, Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd. Perkembangan selanjutnya, sesuai dengan dinamika institusi pendidikan Islam di tanah air, IAIN STS berkomitmen untuk melakukan transformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui program *Wider Mandate* (WM). Untuk lebih memastikan proses IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi guna memberdayakan sekaligus mengembangkan program *wider mandate*, pada tahun 2007 atas persetujuan Senat Institut yang diketuai Prof. Dr. H. Mukhtar Latif, M.Pd, Rektor terpilih periode 2006-2010 mengganti *Wider Mandate* (WM) menjadi Lembaga Pengembangan Universitas Islam Negeri (LP-UIN). Untuk keperluan peningkatan mutu akademik pada saat bersamaan juga dibentuk Lembaga Peningkatan Mutu Akademik (LPMA). Disusul beberapa bulan kemudian dengan pendirian Ma'had Aly (MA) yang diperuntukkan bagi program pembinaan dan peningkatan mutu mahasiswa.

Mengingat masing-masing disiplin ilmu memiliki kerangka tersendiri, meskipun tetap saling berhubungan dan berkaitan, maka untuk mempertajam dan membangun profesionalitas keilmuan, dibentuklah beberapa fakultas yang kemudian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait untuk program akademik. Dalam pelaksanaannya secara struktural, organisasi fakultas terdiri dari Dekan dan Pembantu Dekan, Senat Fakultas, Dosen, Bagian Tata Usaha dan ketua Jurusan dan atau Program Studi.

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya di bagi kepada empat fakultas, yaitu Fakultas Syariah (jurusan terdiri dari Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Hukum Perdata Islam (AS), Hukum Pidana dan Politik Islam (JS), Ekonomi Islam (EI), Ilmu Pemerintahan (IP) dan Muamalat). Fakultas Tarbiyah (jurusan terdiri dari: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Kependidikan Islam (KI), dan Tadris yang mencakup program studi (prodi) fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris), Fakultas Usuludin (jurusan terdiri dari: Aqidah dan Filsafat/Pemikiran Keislaman (AF), Tafsir Hadits (TH), Dakwah/Komunikasi dan Penyiaran Islam (DW), Ilmu Jurnalistik (IJ), Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat Islam/Konseling Islam (BPMI), dan Fakultas Adab (jurusan terdiri dari: Sejarah dan Peradaban Islam, Bahasa dan Sastra Arab,

Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Perpustakaan, Program Akta IV), dan Program Pascasarjana (Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Metodologi dan Pemikiran Hukum Islam, Konsentrasi Pemikiran Agama dan Filsafat Islam, Konsentrasi Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam).

E. Profil Sosial Masyarakat Jambi

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat yang heterogen karena masyarakat Jambi terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, Aceh, Bajau, Banjar, Batak, Bugis, Cina, Flores, Jawa, India, Kerinci, Kubu, Madura, Melayu Palembang, Melayu Riau, Melayu Jambi (Orang Batin, Orang Penghulu, Orang Kalbu 12, Talang Mamak yang oleh sebagian ahli dikategorikan suku asli Jambi,⁴ Minang, Sunda; yang menyatu menjadi masyarakat Jambi sekarang.

Secara Sosial Budaya dalam Masyarakat suku Melayu ditemui adanya kesatuan-kesatuan kelompok sosial, di mana kesatuan kelompok sosial tersebut semata-mata terjadi akibat adanya pemisahan garis batas administratif belaka, sedangkan pada masyarakat dari suku yang lainnya terutama dalam hal suku asli, kesatuan-kesatuan kelompok tidaklah ditemui. Ciri khas yang menguatkan pada masyarakat suku Melayu terdapat adanya beberapa kesatuan kelompok sosial adalah terdapatnya perbedaan dalam hal logat bahasa, walaupun perbedaan logat bahasa tidak terlalu mencolok. Walaupun mereka menyadari akan adanya perbedaan, tetapi tetap merasa dan menyadari di antara mereka adalah semua dari satu keturunan dari nenek moyang yang sama. Bahkan, jika berada di daerah lain misalnya di Aceh atau Jawa, rasa kesamaannya semakin kuat. Begitu pula halnya dengan suku asli yang lainnya, masing-masing merasa bahwa dirinya orang Batin, Orang Penghulu, Orang Kubu, Orang suku Kerinci dan lain sebagainya, tetapi jika berada di daerah lain tetap merasa bahwa dirinya sebagai putra Jambi.⁵

Salah satu unsur budaya adalah bahasa. Di Provinsi Jambi hanya ada satu, yaitu Bahasa Melayu dengan beberapa dialek lokal seperti dialek Kerinci, Bungo/Tebo, Sarolangun, Bangko, Melayu Timur (Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur), Batanghari, Jambi Seberang, Anak Dalam dan Campuran. Khusus untuk masyarakat Kerinci, mereka mempunyai aksara tersendiri yang dikenal dengan Aksara Encong yang dapat ditemui dan digunakan oleh sekelompok masyarakat di sana.

Di propinsi ini adat istiadat Melayu sangat dominan. Adat inilah yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikan kepada hukum Islam. Adagium "adat bersendikan sara', sara' bersendikan kitabullah" atau "Sara' mengato adat memakai" sangat memasyarakat. Penegak syariat Islam banyak mewarnai masyarakat Jambi. Dalam keseharian mereka, banyak ajaran dan pengaruh Islam diterapkan, di antaranya tradisi tahlilan, kematian, Yasinan, serta berbagai upacara yang dilakukan mengikuti daur hidup manusia.

Sebagai masyarakat agraris, warga Jambi juga kerap melaksanakan adat-istiadat yang berkaitan juga dalam bidang pertanian, misalnya adat "serentak turun ke umo". Dalam mengolah sawah sesuai dengan musimnya dengan berpedoman pada rotasi iklim, hal ini di

sebut “piamo”. Dalam hal keamanan tanaman agar tidak dirusak ternak, berlaku pepatah adat “umo bekandang siang, kerbo bekandang malam”, yang berarti jika binatang ternak mengganggu tanaman siang hari, maka tanggung jawab tetap pada si pemilik sawah atau kebun. Sebaliknya jika ternak memasuki sawah atau kebun pada malam hari, tanggung jawab tetap ada di pundak pemilik ternak.⁶

Propinsi Jambi kaya akan kerajinan, salah satu bentuk kerajinan daerah adalah anyaman yang berkembang dalam bentuk aneka ragam. Kerajinan anyaman dibuat dari daun pandan, daun rasau, rumput laut, batang rumput resam, rotan, daun kelapa, daun nipah, dan daun rumbia. Hasil anyaman ini bermacam-macam pula, mulai dari bakul, sumpit, ambung, katang-katang, tikar, kajang, atap, ketupat, tudung saji, tudung kepala dan alat penangkap ikan yang disebut sempirai, pangilo, lukah, dan sebagainya. Kerajinan lainnya adalah hasil tenun yang sangat terkenal, yaitu tenunan dan batik Jambi motif flora.⁷

Undang-undang Adat Jambi

Undang-undang adat Jambi, memuat aturan-aturan hukum adat istiadat masyarakat Jambi, khususnya mengatur mengenai ketentuan hukum pidana adat (*Adat delichten recht*). Istilah ini tidak dikenal oleh kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat hanya mengenal hukum pidana adat dengan istilah “kesalahan” atau “salah” dan “sumbang” untuk menyatakan terhadap perbuatan bertentangan dengan hukum adat. Ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Sumbang kecil apabila perbuatan tersebut hanya mengakibatkan kerugian terhadap seseorang atau beberapa orang (keluarga atau kerabat). Kesalahan besar atau sumbang besar apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan mengganggu keseimbangan masyarakat adat secara keseluruhan.

Aturan-aturan hukum pidana adat tersebut sudah dikenal oleh masyarakat adat sejak dari nenek moyang sebelum agresi Belanda masuk ke Indonesia. Jenis-jenis aturan hukum adat, oleh masyarakat adat Jambi dikenal dengan undang nan dua puluh. Akan tetapi secara sistematis dibagi menjadi dua bagian yaitu, “Pucuk Undang nan Delapan” dan “Anak Undang nan Duabelas”. Namun keduanya mengatur bentuk kejahatan (hukum publik) dan tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan paranata ekonomi (hukum privat / sipil).

Munculnya nama Jambi sebagai satu kawasan di sekitar Sungai Batanghari memiliki latar belakang sejarah dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan bahwa nama Jambi muncul sejak daerah ini dikendalikan oleh seorang ratu bernama Puteri Selaras Pinang Masak, yaitu semasa keterikatan dengan Kerajaan Majapahit. Waktu itu bahasa keraton dipengaruhi bahasa Jawa, di antaranya kata pinang disebut jambe. Sesuai dengan nama ratunya “Pinang Masak”, maka kerajaan tersebut dikatakan Kerajaan Melayu Jambe. Lambat laun rakyat setempat umumnya menyebut “Jambi”.

Versi tersebut disangkal oleh kenyataan lain, seperti apa yang ditulis dalam berita Cina oleh Sang Hui Yao. Catatan tersebut mengemukakan bahwa pada tahun 1082 Kerajaan Jambi masih utuh. Kata Jambi ini ditulisnya dengan aksara Cina yang bacaannya: Champei.

Hal ini menunjukkan bahwa versi pertama, yang mengaitkan dengan nama Puteri Pinang Masak, agak meragukan dibandingkan dengan versi kedua. Sebab pendapat versi kedua ini berjarak 300 tahun sebelumnya.

Versi ketiga, kata Jambi ini sebelum ditemukan oleh Orang Kayo Hitam atau sebelum disebut Tanah Pilih, bernama Kampung Jam, yang berdekatan dengan Kampung Teladan, yang diperkirakan di sekitar daerah Buluran Kenali sekarang. Dari kata Jam inilah akhirnya disebut "Jambi".

Versi keempat berpedoman pada buku sejarah *De Oudste Geschiedenis van de Archipel* bahwa Kerajaan Melayu Jambi dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 merupakan bandar atau pelabuhan dagang yang ramai. Di sini berlabuh kapal-kapal dari berbagai bangsa, seperti: Portugis, India, Mesir, Cina, Arab, dan Eropa lainnya. Berkenaan dengan itu, sebuah legenda yang ditulis oleh Chaniago menceritakan bahwa sebelum Kerajaan Melayu jatuh ke dalam pengaruh Hindu, seorang puteri Melayu bernama Puteri Dewani berlayar bersama suaminya dengan kapal niaga Mesir ke Arab, dan tidak kembali. Pada waktu lain, seorang putri Melayu lain bernama Ratna Wali bersama suaminya berlayar ke Negeri Arab, dan dari sana merantau ke Ruhum Jani dengan kapal niaga Arab. Kedua peristiwa dalam legenda itu menunjukkan adanya hubungan antara orang Arab dan Mesir dengan Melayu. Mereka sudah menjalin hubungan komunikasi dan interaksi secara akrab.

Kondisi tersebut melahirkan interpretasi bahwa nama Jambi bukan tidak mungkin berasal dari ungkapan-ungkapan orang Arab atau Mesir yang berkali-kali ke pelabuhan Melayu ini. Orang Arab atau Mesir memberikan julukan kepada rakyat Melayu pada masa itu sebagai "Janbi", ditulis dengan aksara Arab: , yang secara harfiah berarti 'sisi' atau 'samping', secara kinayah (figuratif) bermakna 'tetangga' atau 'sahabat akrab'.⁸

Penduduk yang berdiam di wilayah Jambi ini dapat dikategorikan atas dua golongan: (1) Orang Jambi asli pertama, yaitu penduduk asli yang bercampur dengan imigran Hindia Belakang dan keturunan-keturunannya. Orang Melayu tua (Proto Melayu) ini hidup 25 abad yang lalu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Suku Bajau, Kerinci, dan Batin; (2) Orang Jambi asli kedua, yaitu keturunan penduduk asli dengan imigran Hindia Belakang yang bercampur dengan orang Jawa di masa pengaruh Majapahit, orang Minangkabau, dan Palembang. Yang termasuk kategori (Deutro Melayu) ini adalah Melayu Jambi, Penghulu, dan Suku Pindah.⁹

Pada abad ke-4, masyarakat Jambi asli pertama mendirikan kerajaan. Adanya kerajaan, tentu dalam masyarakat itu ada orang yang dirajakan. Pada masa ini raja sangat absolut dan rakyatnya masih primitif. Pada abad ke-7, di Hilir Sungai Batanghari, berdiri kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu Jambi ini merupakan perkembangan kerajaan Jambi semenjak kira-kira 300 tahun sebelumnya. Hanya kemudian mempunyai sebutan khusus "Kerajaan Melayu".

Kerajaan Melayu Jambi pada abad ke-7 dikenal luas dalam sejarah dunia. Kerajaan ini memegang peranan penting pada masa itu, karena kerajaan ini menjadi titik pertemuan lalu lintas pelayaran. Dari India ke Cina, dari bagian barat ke Maluku bagian timur, dari

Cina ke Barat, kapal-kapal layar itu dipaksa alam melepas sauh di Pelabuhan Melayu Jambi. Di sini mereka menunggu peredaran musim, arah angin, dan ke mana pelayaran mereka selanjutnya. Dengan demikian, kerajaan Melayu Jambi menjadi pusat perdagangan dan transaksi pedagang Persia, Arab, India, Mesir, Cina, dan Eropa lainnya. Pada masa ini kerajaan Melayu Jambi dikenal sebagai penghasil lada, hasil hutan, dan emas. Pada masa ini pun kerajaan Melayu yang sudah dipengaruhi Hindu, pada mulanya animisme, dan telah mendirikan sekolah tinggi yang dikunjungi orang-orang dari berbagai kerajaan untuk mempelajari agama Budha dan bahasa Sansekerta.

Pada masa kerajaan Melayu, Jambi belum memiliki batas wilayah yang jelas dan kongkret secara geografis. Batas-batas tersebut baru berupa konvensi menurut adat dan kekuasaan, yaitu: dari Tanjung Jabung sampai Durian Takuk Rajo; dari Sialang Belantak Besi ke Bukit Tambun Tulang. Tanjung Jabung adalah daerah pantai Jambi, termasuk Pulau Berhala, Pulau Telor, Pulau Laya, dan Pulau Majin sampai ke Tungkal. Durian Takuk Rajo berada di Setinjau Laut daerah Sumatera Barat sekarang, sedangkan Bukit Tambun Tulang berada di Singkut (terletak di perbatasan Jambi Sumatera Selatan. Batas-batas tersebut diakui dan tersimpan di hati segenap rakyat Jambi, yang harus dipertahankan dari invasi Belanda yang telah mangkal di daerah tetangganya, seperti Palembang, Padang, Bengkulu, dan Riau pada masa itu.

Pada permulaan abad ke-8 salah seorang raja Melayu Jambi (Sri Maharaja Srindrawarman) menganut agama Islam. Namun, antara permulaan abad ke-8 dan permulaan abad ke-12 terjadi masa vakum dakwah Islam di Jambi. Agama Islam mazhab Syafi'i baru mulai berkembang di Jambi, setelah daerah ini takluk di bawah kekuasaan Samudra Pasai (1285–1522). Yang memberi corak khusus dan yang menentukan jalannya perkembangan serta yang nyata-nyata mengubah kebudayaan Melayu Jambi adalah pengaruh-pengaruh dari agama Islam. Pengaruh ini menghasilkan ciptaan-ciptaan yang memberi ciri tertentu kepada kebudayaan Melayu Jambi. Agama Hindu/Budha, yang dalam zaman purba telah menentukan corak dan disebut kebudayaan Melayu Jambi didesak oleh agama Islam. Dalam pembentukan kebudayaan baru, yang tumbuh dan berkembang adalah kebudayaan pengaruh Islam. Pengaruh Islam itu pulalah yang memberikan dan menentukan arah baru serta corak khusus kebudayaan material dan spiritual Melayu Jambi.

Dalam kurun Islam pada abad ke-15 dan 16, pemerintahan kesultanan muncul di Jambi. Di Kesultanan Jambi pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, struktur pemerintahannya terdiri atas: (1) Kuasa Sultan, (2) Kuasa Patih Dalam, (3) Kuasa Patih Luar, (4) Kuasa Batin (Jenang), (5) Kuasa Tenganai, dan (6) Kuasa Dusun (Penghulu). Sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, daerah Jambi merupakan daerah keresidenan, bagian dari Provinsi Sumatera. Ketika Provinsi Sumatera pecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, Keresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kotapraja Jambi masuk Provinsi Sumatera Tengah.

Jambi kemudian menjadi daerah Swatantra Tingkat I, yang terlepas dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah. Jambi menjadi Provinsi Daerah Tingkat I Jambi

melalui badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) sampai kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Provinsi Jambi yang membujur di bagian tengah Sumatera, memiliki luas wilayah 53.435 Km²; berada antara 00.45' – 02.45' Lintang Selatan dan 101.00' – 104.055' Bujur Timur. Saat ini Provinsi Jambi terbagi atas sembilan kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi ini memeluk agama Islam (96,14 %), disusul kemudian protestan (1,85%), Budha (1,21%), Katolik (0,66%), Hindu (0,07%), dan lainnya (0,07%).¹⁰

Provinsi Jambi memiliki potensi kebudayaan yang cukup banyak dan beraneka ragam, seperti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, bahasa dan sastra, dan kesenian. Di Provinsi Jambi terdapat 123 situs peninggalan sejarah, dengan rincian: Kota Jambi 5 situs, kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi 31 situs, Kabupaten Tebo dan Bungo sebanyak 16 situs, di Kabupaten Merangin dan Sarolangun 16 situs, Kabupaten Kerinci 49 situs, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat 6 situs.

Jambi sebagai salah satu daerah budaya Nusantara, masyarakatnya dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Melayu, yang dikenal dengan Melayu Jambi. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu menunjukkan pula pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Melayu Jambi. Sastra Melayu Jambi dapat ditelusuri lewat beberapa tahapan perkembangan, yakni; (1) sastra Melayu Jambi asli, (2) sastra pengaruh Hindu/Budha, (3) sastra pengaruh peralihan. (4) dan sastra pengaruh Islam. Masing-masing tahapan itu memiliki bentuk dan genre sendiri-sendiri, yang memperkaya khazanah kebudayaan Melayu di Nusantara.

Di bidang kesenian, berbagai cabang seni dimiliki pula oleh Provinsi Jambi. Seni musik, seni tari, seni rupa, seni lakon, dan seni kria tradisional lainnya memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi inspirasi, bahan, dan konvensi dalam penciptaan kesenian modern di Jambi khususnya dan Nusantara umumnya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya berbagai cabang kesenian Melayu Jambi tersebut mengalami akulturasi dengan unsur-unsur kesenian bangsa lain atau suku bangsa lain di Nusantara. Dengan demikian kesenian Melayu Jambi ada yang orisinal atau tradisional dan ada pula yang bersifat akulturatif, kombinatif, kolaboratif atau modern.¹¹

F. Social Services IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Mengingat posisi agama dalam struktur masyarakat muslim Jambi sangat penting, maka sesungguhnya sangat diperlukan upaya mempertahankan dan mengembangkan pemahaman agama tersebut. Upaya mengembangkan perilaku keberagamaan tentunya tidak terpisah dari usaha mempertajam dan menggali pemahaman agama sesuai kondisi dan perkembangan zaman. Pemahaman agama dalam konteks zaman dalam arti bagaimana merealisasikan ajaran agama dengan semangat *rahmatan lil'alamin*. Sehingga dalam

pemahaman masyarakat tidak terjadi dualisme persepsi dalam beragama, dalam arti, terjadi dilema antara pelaksanaan ajaran agama secara murni pada satu sisi dan jebakan modernism pada sisi yang lain.

Pemahaman yang parsial terhadap agama mengakibatkan terjadinya dilema antara kepatuhan kepada ajaran agama dengan realitas sosial yang kemudian berujung pada pemahaman yang menganggap bahwa agama hanyalah penghalang dan penghambat kemajuan. Maka di sinilah peran para cendekiawan dan akademisi muslim, khususnya yang berada di bawah naungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, untuk memberi penjelasan dan bimbingan. Bimbingan dan penjelasan tentang ajaran agama Islam yang universal itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti: bimbingan dan pengajaran dalam bidang tanggung jawab individual (*fard 'ain*) seperti pemahaman tentang *thaharah*.

Bimbingan dan pengajaran masyarakat tentang *thaharah*, merupakan suatu yang bisa dikategorikan sebagai kerja prioritas, mengingat pemahaman tentang *thaharah* adalah kebutuhan individual yang bagi setiap muslim wajib mengetahuinya. Terlebih bagi masyarakat religius yang berlatar pendidikan agama, pelajaran *thaharah* sudah menjadi bahasa budaya yang sudah familiar di tengah masyarakat.

Bagi masyarakat Jambi, tentunya pembekalan dan pemahaman tentang *thaharah* menjadi persoalan pokok keberagamaan. Bahkan, pembekalan dan pengajaran ini harus menjadi prioritas, mengingat konten tentang *thaharah* tersebut sangat berkaitan dengan perilaku ibadah yang dilaksanakan sehari-hari, seperti tentang *wudu*, *tayamum*, *janabah*, mensucikan haid, mencuci: sayur, beras, baju, alas salat atau sajadah, lantai masjid, dan sebagainya. Mengingat begitu pentingnya pemahaman masyarakat muslim tentang *thaharah* karena bila tidak benar yaitu menjadi bersih dan suci akan mengakibatkan tidak sahnya ibadah yang dilakukan, maka sangat diperlukan pengajaran dan pelatihan riil dari para ulama, ustadz, atau akademisi muslim untuk memberikan kontribusi, baik melalui pengajian umum, majlis taklim ataupun penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Bimbingan dan pengajaran dalam bidang tanggung jawab publik (*fard kifayah*) seperti tata cara pengurusan janazah, baik tata cara solat janazah, cara memandikan, mengapani dan memakamkan jenazah.

Persoalan tanggung jawab keagamaan yang berhubungan dengan masyarakat umum atau yang dikenal dengan *fard kifayah* menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat muslim, khususnya bagi masyarakat muslim daerah Jambi. Seiring dengan dahsyatnya pengaruh global, pemahaman masyarakat muslim tentang persoalan yang berhubungan dengan *fard kifayah* juga mengalami problem yang tidak mudah untuk dicari solusinya. Problematika ini akhirnya terperangkap dalam jebakan individualitas yang berujung menjadi sikap kapitalistik.

Problematika ini bertolak dari anggapan bahwa, pelaksanaan *fard kifayah* sudah dapat menggugurkan kewajiban kepada Allah manakala tugas tersebut telah dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat. Sehingga yang terjadi justru banyak dari masyarakat yang menganggap abai dan bahkan merasa tidak perlu untuk memahami, apatah lagi

mendalaminya. Situasi demikian, mengakibatkan kurangnya orang-orang yang dapat mengurus persoalan *fard kifayah* seperti pengurusan jenazah.

Akibat dari kurangnya kepedulian untuk memahami dan mendalami persoalan yang berhubungan dengan *fard kifayah* tadi, akhirnya menjadi persoalan sosial baru, di mana untuk pengurusan jenazah misalnya, harus mencari orang-orang faham tentang hal tersebut, atau mereka mengeluarkan biaya untuk mengupah pekerjaan tersebut. Jika demikian, maka hal ini akan membebani masyarakat muslim yang miskin, mengingat terkadang biaya untuk pengurusan jenazah saja memerlukan uang yang tidak sedikit. Selain itu, bila orang yang biasa melaksanakan *fardlu kifayah* berhalangan, sedangkan ada orang yang meninggal, maka akan tekatung-katunglah jenazah tersebut karena menunggu atau mencari orang lain dari desa tetangga untuk melaksanakannya. Dari sinilah letak pentingnya pembekalan atau penyuluhan masyarakat tentang pemahaman *fard kifayah*, dan hal ini sudah dirasakan oleh banyak masyarakat, sehingga mereka meminta untuk dibimbing dan diajarkan *fard kifayah* ini oleh pihak akademisi yang bernaung di bawah institusi Islam, terutama IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Persoalan umat yang berhubungan zakat juga tidak kalah pentingnya untuk dijadikan program prioritas oleh lembaga keagamaan Islam, utamanya oleh institusi IAIN. Persoalan zakat tidak hanya menyangkut pemahaman harta yang dizakati, namun juga menyangkut tentang pemahaman siapa saja yang berhak menerima zakat (*asnab zakat*), bagaimana melaksanakan zakat yang benar dan sah, juga problematika manajemen zakat yang masih saja terasa sangat tradisional. Dalam tradisi keberagamaan masyarakat tradisional, persoalan zakat hanya ada dalam harta yang disebutkan namanya secara jelas dalam kitab-kitab “kuning” (*turats*) oleh para ulama terdahulu, sehingga terjadi penyempitan makna kewajiban harta yang mesti ditunaikan zakatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses perkembangan perniagaan, perdagangan, pertanian dan perbankan sangat jauh lebih dinamis dan berkembang, sehingga ada beberapa hal yang mungkin pola tersebut tidak atau belum dijumpai pada zaman dahulu, dan hal tersebut luput dari ijtihad para fukaha. Dari itu, dalam konteks kekinian, persoalan zakat selain telah banyak mengalami perkembangan secara institusional, juga ada banyak pendapat para ulama sesuai hasil ijtihad yang telah mereka lakukan, seperti adanya zakat profesi, zakat perbankan, zakat hasil perkebunan yang tidak hanya terdiri dari bahan pokok, tapi juga mencakup kebutuhan lain, yang menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit.

Persoalan pemahaman tentang kewajiban harta yang dizakatkan (*amwal azakawiyah*) tersebut, juga telah banyak bersinggungan dengan masyarakat muslim di daerah Jambi, terlebih, sumber kehidupan masyarakat Melayu Jambi secara umum adalah bersumber dari pertanian, seperti sawit, karet, batu bara dan sebagainya. Maka, urgensi penyuluhan dan bimbingan tentang zakat tersebut terasa sangat mendesak untuk diperhatikan oleh para ilmuwan kampus, utamanya bagi kalangan akademisi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bimbingan tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebagai institusi keagamaan Islam, bentuk *social services* IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mesti memiliki sensitifitas terhadap program penanggulangan kemiskinan. Upaya ke arah itu tentu dengan program kerja yang nyata dan jelas dan dapat direalisasikan. Di antara yang mungkin dilakukan oleh akademisi IAIN adalah dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ini tidak terkesan muluk apalagi melangit, mengingat kampus IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini telah memiliki program studi ekonomi Islam, yang mana di dalamnya tidak hanya mengajarkan ekonomi secara teori, namun juga lebih menitik kepada perspektif Islam terhadap status hukum dalam melakukan transaksi ekonomi.

Peran ini terasa sangat strategis, karena pengentasan kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi umat tidak sebatas persoalan akademik, namun juga sebagai realisasi pesan agama yang selalu memerintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan selalu memberi sugesti agar umat untuk saling mengasihi antar sesama. Dari itu, tentunya lembaga IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hendaknya perlu andil dalam program pemberdayaan umat dalam rangka mensejahterakan mereka.

Pendampingan terhadap Guru Madrasah dan Guru Agama Sekolah Umum

Salah satu program prioritas yang dapat menjadi unsur pelayanan sosial oleh pendidikan tinggi adalah melakukan pendampingan terhadap guru madrasah di berbagai peringkatnya (ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah) dan guru agama di sekolah umum. Perumpamaan masalah struktural yang dihadapi oleh para guru misalnya tentang kenaikan pangkat para guru yang sudah terjadi hampir 10 tahun lebih. Misalnya ada dari kalangan guru tidak bisa naik pangkat dari golongan IV/a ke IV/b, padahal masa kerja golongan IV/a sudah lebih 5 tahun sehingga semangat dan kinerjanya mulai melemah. Penyebabnya adalah bila akan naik pangkat harus menyusun karya ilmiah (KI) melalui penelitian tindakan kelas (PTK) dan harus diseminarkan tingkat nasional, artinya harus mengundang para pakar dari perguruan tinggi selain dari Jambi, begitu juga peserta seminarnya. Peraturan ini menjadi suatu kesukaran bagi para guru sekolah agama dan guru agama di sekolah umum jika dilakukan secara individual.

IAIN Jambi dalam hal ini dapat membantu dengan menugaskan Fakultas Tarbiyah yang banyak mempunyai tenaga ahli untuk membuat pelatihan dan pendampingan para guru membuat karya ilmiah. Dari wawancara penelitian ini dengan para guru mereka tidak keberatan terhadap biaya pelatihan asalkan mereka dapat meneliti dan menulis hasilnya serta membuat seminar sesuai standar atau peraturan yang telah ditetapkan.

G. Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain: *Pertama*, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi belum dilaksanakan secara terintegrasi. Seharusnya kegiatan pengabdian

itu bersumber dari pendidikan, pengajaran dan penelitian kalangan kampus. Namun dikarenakan belum dipahaminya program tersebut oleh para pengambil kebijakan, yaitu pihak Kementerian Agama, rektorat, dekanat, kampus dan Pusat Pengabdian Masyarakat sendiri, serta oleh para dosen, karyawan, dan mahasiswa, program pengabdian kepada masyarakat itu masih berkuat secara tradisional dan cenderung tanpa kemajuan.

Kedua, jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara ilmiah yang bisa dilakukan oleh civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah dalam bentuk pelayanan sosial atau *social services* yang mempunyai banyak bentuk: bimbingan ibadah sehari-hari (misalnya pelaksanaan *farldu kifayah*, *taharoh*, dan lain-lain), bimbingan tentang zakat dan penguatan institusinya, pembinaan ekonomi umat, bimbingan Penelitian Tindakan Kelas bagi guru-guru yang sedang mengusahakan kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya, pelatihan pengelolaan masjid, pelatihan membuat khutbah, pelatihan pengelolaan majlis taklim dan program islamisasi masyarakat terasing.

Ketiga, masyarakat memang menghendaki model pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditingkatkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melayani mereka secara sosial (*social services*) menjadi model pelatihan, model perencanaan yang memakai silabus (khusus untuk konsep khutbah Jumat dan semacam kurikulum majlis taklim untuk orang tua dan remaja), praktek langsung dipandu modul (*farldu kifayah*, *taharah*, PTK, pengislaman masyarakat terasing).

Keempat, faktor pendorong untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat secara ilmiah oleh civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah memang permintaan dan kebutuhan masyarakat, banyaknya ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika dapat menjawabnya. Faktor penghambatnya adalah tidak adanya kebijakan yang jelas mengatur dari para perumus kebijakan, yaitu pihak Kementerian Agama, rektorat, dekanat, para dosen, mahasiswa, dan karyawan; akibatnya pengabdian kepada masyarakat secara ilmiah tidak pernah terprogram dengan baik, juga tidak dianggarkan secara baik dalam APBN, APBD maupun anggaran IAIN sendiri, walaupun ada baru sebatas anggaran untuk Kuliah Kerja Nyata.[]

Catatan:

¹ Anonim, 2006, hlm. 15.

² Soerjono Sukanto dan Agus Brotosusilo, *Masyarakat dan Kekuasaan*, 1987, hlm. 4.

³ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 337.

⁴ Depdikbud, 1986.

⁵ Depdikbud, 1986.

⁶ www. Melayu online

⁷ www. Melayu online

⁸ <http://dedisyaputra.wordpress.com/2008/11/23/jambi-selayang-pandang>

⁹ <http://dedisyaputra.wordpress.com/2008/11/23/jambi-selayang-pandang>

¹⁰ <http://dedisyaputra.wordpress.com/2008/11/23/jambi-selayang-pandang>

¹¹ <http://dedisyaputra.wordpress.com/2008/11/23/jambi-selayang-pandang>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995).
- Anonim, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta, 2003.
- Anonim, Panduan Aplikasi Program Tahun 2007 Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah, Jakarta, 2007.
- Anonim, Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat, (Jakarta, 2008).
- Bruce W.Tuckman. *Conducting Educational Research*, (New York: Harcourt Brace, 1972).
- Dedi Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Penelitian Komunikasi dan Ilmu Lainnya*. (Bandung: Rosdakarya, 2002.)
- Dennis P.Forcese and Stepher Richer.1973.Social Research Method.New Jersey: Prentice-Hall Inc Englewood Cliffs.
- Fred M.Kelinger.1998.Asas Penelitian Behavior.Edisi ke-3. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadari Nawawi.1991.Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Yasbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- , *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985
- , *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramdeia, Jakarta, 1985
- Lexy J.Moleong.1996.Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:Kogan Page.
- M.Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota & Desa*, Usaha Nasional Surabaya, 1982.
- Milles and Hubberman.1994. *Qualitative Data Analysis*.London,New Delhi:Sage Publications International Education and proffesioanal Publiser.
- Sanafiah Faisal.1990.Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang:Yayasan Asih Asuh.
- Suharsimi Arikunto.1990.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ditbinpertais.1985.Metode Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Agama RI tahun 2008 tentang Statuta IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Indonesia, Jakarta, 1982
- , *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Agus Brotosusilo, *Masyarakat dan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- Tim Peneliti. *Pembinaan Kehidupan Beragama Masyarakat Orang Dalam Nebang Parah Kabupaten Muaro Jambi*. Laporan Penelitian 2005..
- Tim Peneliti, *Kehidupan Keagamaan Masyarakat Transmigrasi Rimbo Bujang*. Laporan Penelitian 1986..
- Tim Peneliti. *Keterkaitan Antara Adat dengan Kehidupan Beragama bagi Masyarakat Terpinggirkan*. Laporan Penelitian Litbang Depag 2009..
- (www: http://jambi-online.com/?page_id=123)
- (<http://dedisyaputra.wordpress.com/2008/11/23/jambi-selayang-pandang>).